

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan penting dalam perkembangan ekonomi global. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan. Ferreira et al. (2022) menjelaskan bahwa ketimpangan merupakan salah satu tantangan pembangunan internasional karena berkaitan dengan berbagai hasil ekonomi, sosial, dan politik, terutama pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan tata kelola.

Ketimpangan pendapatan global menunjukkan pola yang cukup kompleks. Gradín (2024) menemukan bahwa ketimpangan global secara relatif mengalami penurunan yang kuat setelah tahun 2000, meskipun ketimpangan secara absolut justru mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan global tidak dapat dipahami sebagai tanda bahwa persoalan ketimpangan telah selesai. Kanbur et al. (2024) bahkan menunjukkan bahwa era penurunan ketimpangan pendapatan global kemungkinan telah berakhir akibat perubahan pada ketimpangan antarnegara dan ketimpangan di dalam negara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, termasuk dengan melihat bagaimana permasalahan tersebut berkembang pada kelompok negara dengan karakteristik ekonomi tertentu.

Permasalahan ketimpangan tidak hanya menjadi perhatian pada tingkat global, tetapi juga relevan untuk dikaji pada negara maju yang

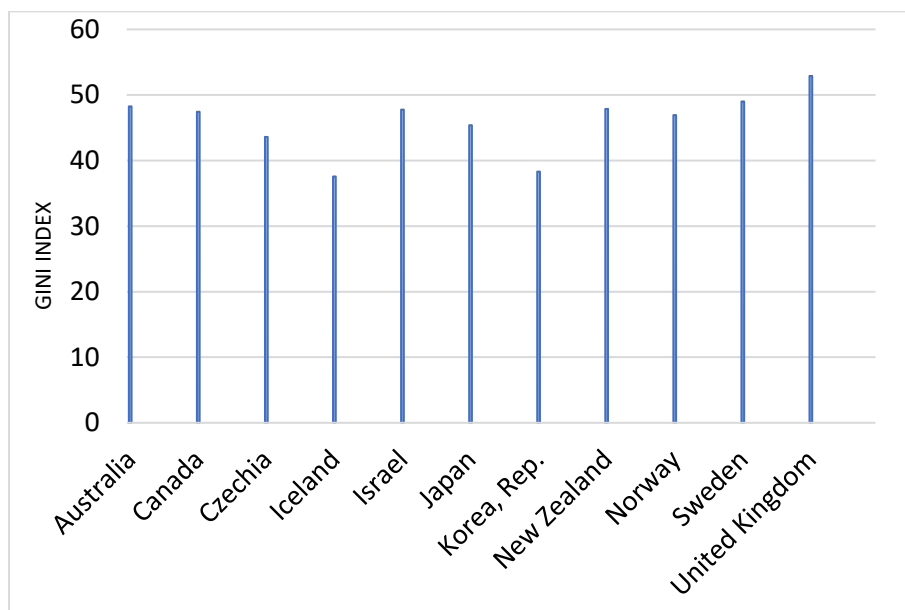
menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF). Negara-negara tersebut menerapkan ITF sebagai kerangka kebijakan moneter yang menempatkan sasaran inflasi sebagai acuan dalam menjaga stabilitas harga. Meskipun demikian, penerapan kerangka tersebut tidak terlepas dari persoalan distribusi pendapatan karena perubahan kondisi dan kebijakan moneter dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kelompok masyarakat. Altunbaş & Thornton (2022) menemukan bahwa penerapan *inflation targeting* berkaitan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan pada negara maju dan berkembang yang mengadopsinya.

Hubungan antara kebijakan moneter dan ketimpangan juga ditemukan pada kelompok negara maju. Garcia & Cross (2024) menunjukkan bahwa guncangan kebijakan moneter kontraktif meningkatkan ketimpangan pendapatan pada negara-negara G7 ketika menggunakan periode pengamatan 1974–2019, meskipun besarnya pengaruh tersebut berkurang atau menghilang pada beberapa negara setelah adopsi *inflation targeting* diperhitungkan. Selanjutnya, Thornton & Vasilakis (2025) menemukan bahwa pendapatan menjadi lebih tidak merata di negara yang mengadopsi *inflation targeting* dibandingkan dengan negara yang tidak mengadopsinya. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga dan persoalan distribusi pendapatan merupakan dua aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ekonomi negara penerap ITF. Oleh karena itu, negara maju penerap ITF menjadi kelompok yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan yang terjadi di dalamnya.

Ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework* (ITF) masih menjadi isu yang relevan untuk dikaji meskipun secara umum negara-negara tersebut memiliki tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah serta kondisi makroekonomi yang lebih stabil dibandingkan negara berkembang. Penelitian ini memilih negara maju penerap ITF bukan karena negara-negara tersebut memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang paling tinggi, melainkan karena ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya dapat diatasi meskipun negara-negara tersebut telah mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, memiliki kualitas institusi yang baik, serta menerapkan kerangka kebijakan moneter yang relatif mapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui penerapan ITF tidak serta-merta diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada kelompok negara maju penerap ITF.

Negara maju dalam penelitian ini mengacu pada klasifikasi *Advanced Economies* yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) melalui *World Economic Outlook* (WEO), sedangkan negara penerap ITF ditentukan berdasarkan klasifikasi *monetary policy framework* dalam *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions* (AREAER) IMF (2023). Berdasarkan kedua kriteria tersebut serta ketersediaan data selama periode 2014–2023, diperoleh sebelas negara maju penerap ITF sebagai sampel penelitian, yaitu Australia, Canada, Czechia, Iceland, Israel, Japan, Korea, Rep., New Zealand, Norway, Sweden, dan United Kingdom. Meskipun memiliki

karakteristik sebagai negara maju dan sama-sama menerapkan ITF, tingkat ketimpangan pendapatan pasar pada negara-negara tersebut tetap menunjukkan variasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rata-rata Indeks Gini pendapatan pasar selama periode 2014–2023 sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.



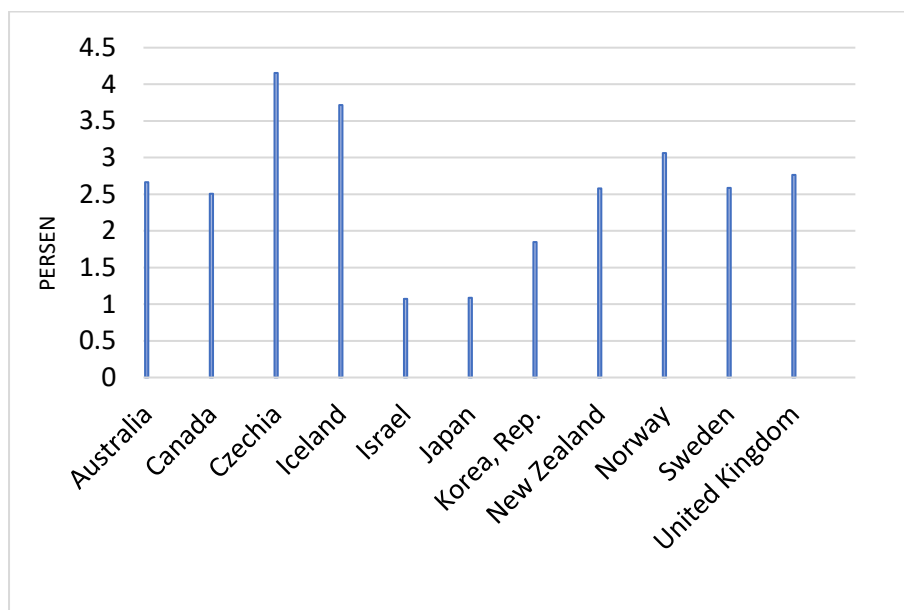
Sumber: Standardized World Income Inequality Database, diolah (2026).

Gambar 1. 1 Rata-Rata Ketimpangan Pendapatan Pasar pada 11 Negara Maju Penerap ITF Tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.1, *United Kingdom* memiliki rata-rata ketimpangan pendapatan pasar tertinggi sebesar 52,90, sedangkan *Iceland* memiliki rata-rata terendah sebesar 37,57. Perbedaan yang cukup besar juga terlihat pada negara-negara lain. *Sweden* memiliki rata-rata Indeks Gini sebesar 49,01 dan *Australia* sebesar 48,26, sementara *Korea, Rep.* berada pada tingkat yang lebih rendah, yaitu sebesar 38,31. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pasar pada negara maju penerap ITF masih bervariasi. Kondisi ini menjadi menarik karena

negara-negara yang berada dalam kelompok penerap kerangka kebijakan moneter yang sama tetap menunjukkan perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi yang berbeda pada masing-masing negara, sehingga perlu dilihat lebih lanjut berbagai faktor makroekonomi yang diduga memengaruhinya.

Salah satu kondisi makroekonomi yang diduga berkaitan dengan perbedaan ketimpangan pendapatan tersebut adalah inflasi. Perubahan tingkat harga dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap distribusi pendapatan karena kemampuan setiap kelompok masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga tidak sama. Glawe & Wagner (2024) menunjukkan bahwa hubungan inflasi dengan ketimpangan pendapatan dapat bersifat nonlinier. Hasil penelitiannya pada 101 negara menunjukkan bahwa inflasi yang berada di atas ambang sekitar 6 persen berkaitan dengan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, sedangkan pada tingkat inflasi yang lebih rendah hubungan tersebut tidak signifikan. Selain itu, Rabhi & Parsons (2025) menemukan bahwa inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat, karena kelompok berpendapatan tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memanfaatkan kenaikan nilai aset dan kekuatan penetapan harga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika inflasi perlu diperhatikan dalam pembahasan ketimpangan pendapatan. Perbedaan kondisi inflasi pada 11 negara maju penerap ITF selama periode 2014–2023 dapat dilihat pada Gambar 1.2.



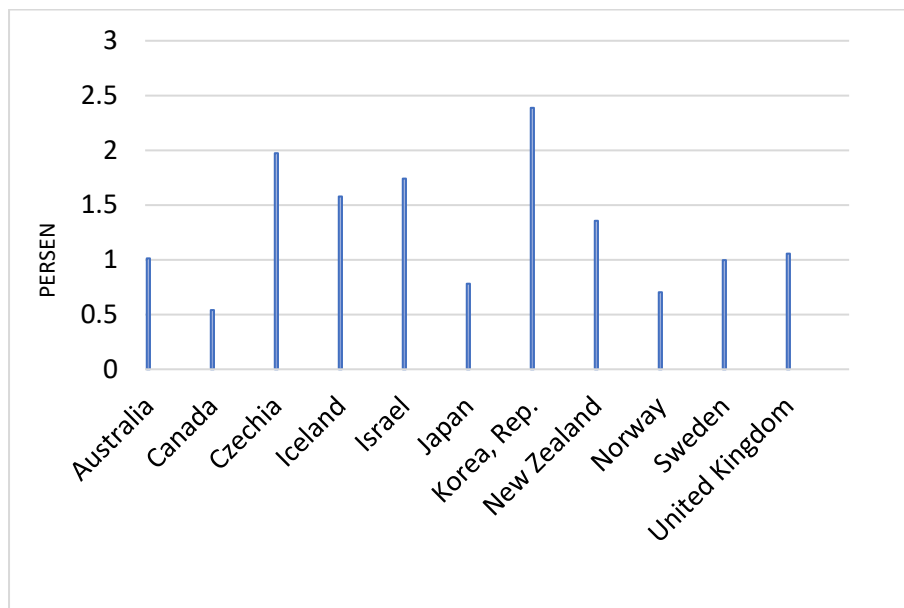
Sumber: World Bank, diolah (2026)

Gambar 1. 2 Rata-Rata Inflasi pada 11 Negara Maju Penerap ITF Tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.2, rata-rata inflasi selama periode 2014–2023 menunjukkan perbedaan antarnegara. *Czechia* memiliki rata-rata inflasi tertinggi sebesar 4,15 persen, diikuti *Iceland* sebesar 3,72 persen, sedangkan *Israel* dan *Japan* memiliki rata-rata inflasi terendah masing-masing sebesar 1,07 persen dan 1,09 persen. Perbedaan rata-rata tersebut juga disertai dengan lonjakan inflasi pada beberapa negara menjelang akhir periode pengamatan. Inflasi di *Czechia* mencapai 15,10 persen pada 2022, sedangkan di *Iceland* mencapai 8,74 persen dan di *Sweden* mencapai 8,55 persen pada 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara maju penerap ITF tetap menghadapi dinamika inflasi yang berbeda, bahkan beberapa negara mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi pada periode tertentu. Adanya perbedaan tersebut menjadikan inflasi sebagai salah satu faktor makroekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan

ketimpangan pendapatan. Selain perubahan tingkat, kondisi perekonomian juga dilihat dari kemampuan suatu negara dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya.

Peningkatan pendapatan per kapita dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi, tetapi manfaat pertumbuhan tersebut belum tentu dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok pendapatan. Destek et al. (2020) menemukan bahwa peningkatan pendapatan riil per kapita berkaitan dengan penurunan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antara peningkatan pendapatan per kapita dan ketimpangan juga dapat berlangsung secara kompleks. Tsitouras & Papapanagos (2025), dalam penelitiannya di Yunani, menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita dapat mendorong pemerataan pendapatan lebih cepat dalam jangka menengah, sementara hubungannya dapat berbeda menurut jangka waktu yang diamati. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita menjadi salah satu kondisi ekonomi yang penting diperhatikan dalam pembahasan ketimpangan pendapatan. Perbedaan pertumbuhan PDB per kapita pada 11 negara maju penerap ITF selama periode 2014–2023 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



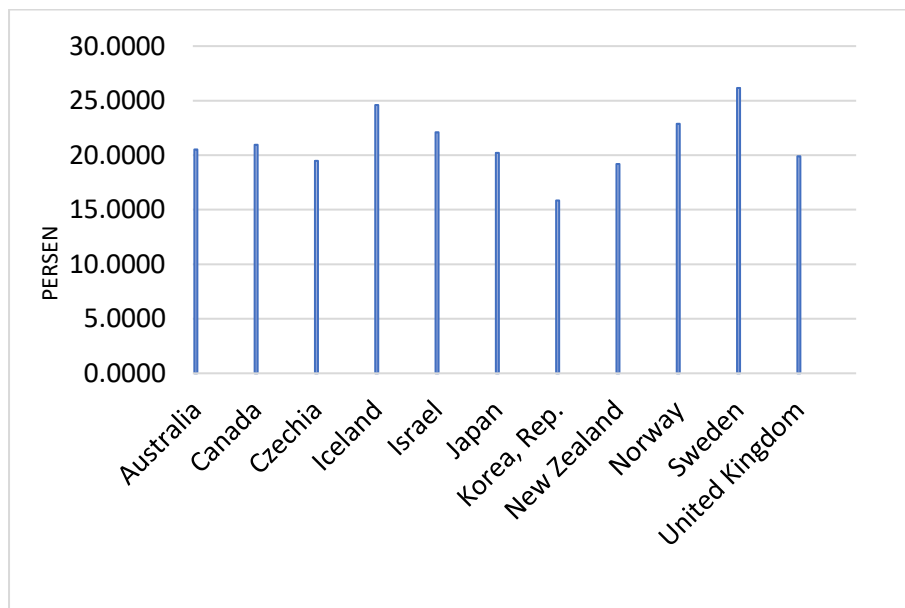
Sumber: World Bank, diolah (2026)

Gambar 1. 3 Rata-Rata Pertumbuhan PDB per Kapita pada 11 Negara Maju Penerap ITF Tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.3, rata-rata pertumbuhan PDB per kapita selama periode 2014–2023 menunjukkan perbedaan antarnegara. *Korea, Rep.* memiliki rata-rata pertumbuhan PDB per kapita tertinggi sebesar 2,39 persen, diikuti oleh *Czechia* sebesar 1,97 persen dan *Israel* sebesar 1,74 persen. Sementara itu, *Canada* memiliki rata-rata terendah sebesar 0,54 persen. Perbedaan rata-rata tersebut juga disertai dengan perubahan pertumbuhan yang cukup besar selama periode pengamatan. Pada 2020, seluruh negara dalam penelitian mengalami pertumbuhan PDB per kapita negatif, dengan penurunan terdalam terjadi di *United Kingdom* sebesar 10,20 persen dan *Iceland* sebesar 8,15 persen. Kondisi tersebut kemudian diikuti oleh pertumbuhan positif pada seluruh negara pada 2021, dengan peningkatan tertinggi terjadi di *United Kingdom* sebesar 8,15 persen dan *Israel* sebesar 7,56 persen. Perbedaan rata-rata serta perubahan pertumbuhan yang

terjadi menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita pada negara maju penerap ITF tidak berlangsung dengan pola yang sama. Kondisi tersebut menjadikan pertumbuhan PDB per kapita sebagai salah satu faktor makroekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan. Namun, perubahan kondisi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perekonomian, tetapi juga dengan peran pemerintah dalam memengaruhi alokasi sumber daya melalui konsumsi pemerintah.

Selain melalui perubahan aktivitas perekonomian, pemerintah juga memiliki peran dalam perekonomian melalui konsumsi pemerintah. Besarnya konsumsi pemerintah dapat mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, keterkaitannya dengan ketimpangan pendapatan tidak selalu menunjukkan arah yang sama pada setiap negara. Davtyan (2016) menemukan bahwa guncangan pengeluaran pemerintah menurunkan ketimpangan pendapatan di *United Kingdom*, tetapi meningkatkan ketimpangan di *United States* dan *Canada*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan dapat berbeda antarnegara. Oleh karena itu, perbedaan tingkat konsumsi pemerintah pada 11 negara maju penerap ITF selama periode 2014–2023 menjadi penting untuk diperhatikan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.4.



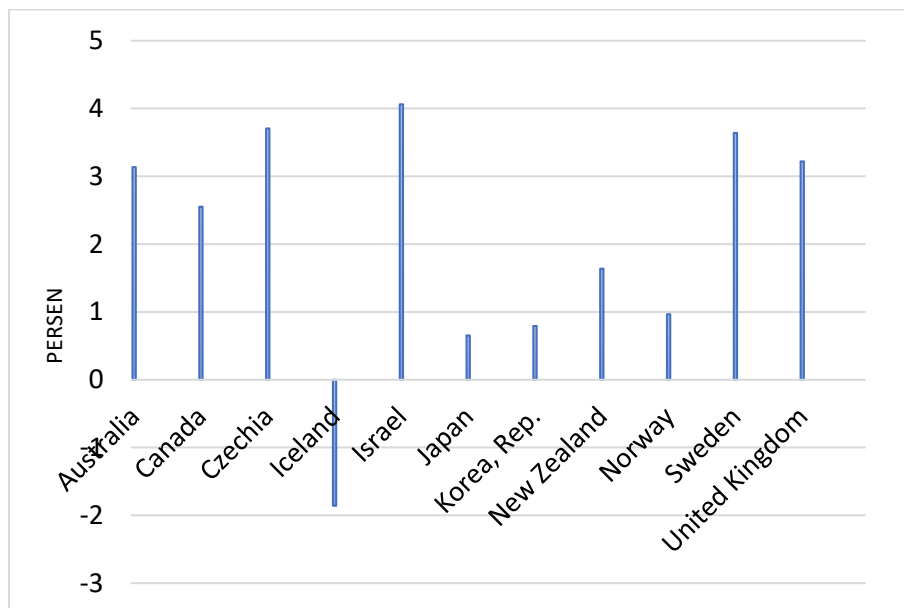
Sumber: World Bank, diolah (2026)

Gambar 1. 4 Rata-Rata Konsumsi Pemerintah pada 11 Negara Maju Penerap ITF Tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 1.4, rata-rata konsumsi pemerintah selama periode 2014–2023 menunjukkan perbedaan antarnegara. *Sweden* memiliki rata-rata konsumsi pemerintah tertinggi sebesar 26,16 persen, diikuti *Iceland* sebesar 24,60 persen dan *Norway* sebesar 22,88 persen. Sementara itu, *Korea, Rep.* memiliki rata-rata terendah sebesar 15,85 persen. Data tahunan juga menunjukkan adanya perubahan konsumsi pemerintah pada beberapa negara selama periode pengamatan. Pada 2020, konsumsi pemerintah di *Iceland* mencapai 27,56 persen, sedangkan *Canada* meningkat dari 20,66 persen pada 2019 menjadi 22,70 persen pada 2020 dan *United Kingdom* meningkat dari 18,93 persen menjadi 22,39 persen pada periode yang sama. Perbedaan rata-rata dan perubahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pemerintah pada negara maju penerap ITF tidak berada pada kondisi yang sama. Oleh karena itu, konsumsi pemerintah menjadi salah satu

faktor makroekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan. Selain faktor yang berasal dari dalam perekonomian, perbedaan ketimpangan pendapatan juga dapat berkaitan dengan keterhubungan suatu negara terhadap aliran modal internasional melalui investasi asing langsung.

Masuknya FDI dapat memberikan tambahan modal dan mendorong aktivitas ekonomi, tetapi manfaat yang dihasilkan belum tentu dirasakan secara sama oleh seluruh kelompok masyarakat. Yuldashev et al. (2023) menemukan bahwa FDI berkaitan dengan penurunan ketimpangan pendapatan pada negara-negara Asia yang diteliti, dan pengaruh tersebut menjadi lebih kuat ketika didukung oleh modal manusia. Namun, hubungan FDI dengan distribusi pendapatan dapat menunjukkan hasil yang berbeda berdasarkan kondisi perekonomian dan kelompok pendapatan. Tsitouras & Papapanagos (2025), dalam penelitiannya di Yunani, menemukan bahwa FDI tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang pengaruhnya berbeda antarkelompok pendapatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan FDI dengan ketimpangan pendapatan tidak selalu berlangsung dengan pola yang sama. Perbedaan aliran masuk FDI pada 11 negara maju penerap ITF selama periode 2014–2023 dapat dilihat pada Gambar 1.5.



Sumber: World Bank, diolah (2026)

Gambar 1. 5 Rata-Rata FDI Net Inflows pada 11 Negara Maju Penerap ITF Tahun 2014-2023

Berdasarkan Gambar 5, rata-rata FDI *net inflows* selama periode 2014–2023 menunjukkan perbedaan antarnegara. *Israel* memiliki rata-rata FDI *net inflows* tertinggi sebesar 4,06 persen terhadap PDB, diikuti oleh *Czechia* sebesar 3,71 persen dan *Sweden* sebesar 3,64 persen. Sementara itu, *Iceland* menjadi satu-satunya negara yang memiliki rata-rata negatif, yaitu sebesar –1,86 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan FDI *net inflows* di *Iceland* hingga –27,93 persen pada 2017. Data tahunan juga menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar pada beberapa negara. *United Kingdom*, misalnya, mencatat FDI *net inflows* sebesar 12,00 persen pada 2016, kemudian turun menjadi –0,86 persen pada 2018. Sementara itu, *Sweden* mengalami peningkatan dari –1,05 persen pada 2014 menjadi 9,35 persen pada 2022. Perbedaan rata-rata dan tingginya fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa aliran masuk FDI pada negara maju penerap ITF

tidak berlangsung dengan pola yang sama. Kondisi ini menjadikan FDI *net inflows* sebagai salah satu faktor makroekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan. Beragamnya hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dan ketimpangan pendapatan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu selanjutnya menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Beragamnya hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dan ketimpangan pendapatan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Glawe & Wagner (2024) menunjukkan bahwa hubungan inflasi dengan ketimpangan pendapatan bergantung pada tingkat inflasi, sedangkan Rabhi & Parsons (2025) menunjukkan bahwa dampaknya dapat berbeda antarkelompok pendapatan. Pada faktor pertumbuhan ekonomi, Destek et al. (2020) menemukan bahwa peningkatan pendapatan riil per kapita berkaitan dengan penurunan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang, sementara Tsitouras & Papapanagos (2025a) menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan pendapatan per kapita dengan distribusi pendapatan dapat berbeda menurut jangka waktu yang diamati. Perbedaan dampak juga terlihat pada konsumsi pemerintah. Davtyan (2016) menemukan bahwa guncangan pengeluaran pemerintah menurunkan ketimpangan di United Kingdom, tetapi meningkatkan ketimpangan di United States dan Canada.

Hubungan yang beragam juga ditemukan antara FDI dan ketimpangan pendapatan. Yuldashev et al. (2023) menemukan bahwa FDI berkaitan dengan penurunan ketimpangan pada negara-negara Asia yang diteliti dan pengaruhnya menjadi lebih kuat ketika didukung oleh modal manusia.

Sementara itu, Tsitouras & Papapanagos (2025a) menunjukkan bahwa pengaruh FDI terhadap distribusi pendapatan di Yunani berbeda menurut jangka waktu dan kelompok pendapatan. Meskipun penelitian mengenai determinan ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan, hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi, pertumbuhan PDB per kapita, konsumsi pemerintah, dan Foreign Direct Investment (FDI) net inflows masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada negara berkembang atau membandingkan negara penerap dan nonpenerap Inflation Targeting Framework (ITF), sehingga kajian mengenai determinan ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap ITF masih terbatas. Padahal, meskipun memiliki tingkat pembangunan ekonomi dan stabilitas makroekonomi yang tinggi, ketimpangan pendapatan di negara-negara tersebut masih terjadi sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis ketimpangan pendapatan yang secara khusus dilakukan pada sebelas negara maju penerap Inflation Targeting Framework (ITF) berdasarkan klasifikasi Advanced Economies dalam World Economic Outlook (WEO) dan klasifikasi monetary policy framework pada Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER) IMF. Penelitian ini mengintegrasikan empat faktor makroekonomi, yaitu inflasi, pertumbuhan PDB per kapita, konsumsi pemerintah, dan Foreign Direct Investment (FDI) net inflows, serta menggunakan ketimpangan pendapatan pasar sebagai indikator untuk menggambarkan distribusi pendapatan sebelum pengaruh redistribusi melalui pajak dan transfer pemerintah selama periode 2014–2023. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai determinan ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap ITF.

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan pada negara maju yang menerapkan *Inflation Targeting Framework* (ITF) penting dilakukan karena stabilitas harga yang menjadi perhatian dalam kerangka kebijakan tersebut perlu dilihat bersama dengan perkembangan distribusi pendapatan. Perbedaan tingkat ketimpangan dan kondisi makroekonomi yang ditunjukkan oleh 11 negara selama periode pengamatan menunjukkan bahwa penerapan kerangka kebijakan moneter yang sama tidak selalu diikuti oleh kondisi ekonomi dan distribusi pendapatan yang seragam. Oleh karena itu, analisis terhadap inflasi, pertumbuhan PDB per kapita, konsumsi pemerintah, dan FDI *net inflows* diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor makroekonomi yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan pada kelompok negara tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan faktor-faktor makroekonomi dengan ketimpangan pendapatan serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami pentingnya menjaga kondisi makroekonomi dengan tetap memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh inflasi, pertumbuhan PDB per kapita, konsumsi pemerintah, dan FDI *net inflows* terhadap ketimpangan pendapatan pada 11 negara maju penerap ITF selama periode 2014–2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023?
2. Apakah pertumbuhan PDB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023?
3. Apakah konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023?
4. Apakah *FDI net Inflows* berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan PDB per kapita terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh konsumsi pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023.

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *FDI net Inflows* terhadap ketimpangan pendapatan pada negara maju penerap *Inflation Targeting Framework (ITF)* periode 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Ekonomi Pembangunan, khususnya dalam kajian mengenai determinan makroekonomi yang memengaruhi ketimpangan pendapatan pada negara maju yang menerapkan *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai pengaruh inflasi, pertumbuhan PDB per kapita, konsumsi pemerintah, dan *Foreign Direct Investment (FDI) net inflows* terhadap ketimpangan pendapatan melalui pendekatan regresi data panel pada periode 2014–2023.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Dan Otoritas Moneter

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas harga dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap distribusi pendapatan, sehingga stabilitas makroekonomi dapat dicapai secara lebih inklusif. Bagi lembaga keuangan dan pembuat kebijakan internasional, penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang pentingnya sinergi kebijakan moneter

dan stabilitas makroekonomi untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di negara ITF berpendapatan menengah bawah.

2. Bagi Pemerintah Dan Pembuat Kebijakan Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan fiskal dan investasi yang lebih efektif, khususnya melalui optimalisasi konsumsi pemerintah serta pengelolaan arus masuk FDI agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata dan tidak memperlebar ketimpangan pendapatan.